

Faktor-Faktor Pencegahan *Fraud* pada Lembaga Perbankan

Putu Purnama Dewi¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Nasional,
Indonesia

Ni Putu Eni Suwantari²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Nasional,
Indonesia

I Putu Dharmawan Pradhana³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Surel : purnamadewi@undiknas.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencegah terjadinya fraud pada lembaga perbankan diantaranya implementasi *good corporate governance*, penerapan budaya tri hita karena serta adanya whistleblowing system. Lokasi penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan populasi seluruh staf BPD Bali cabang Renon dengan total sampel berjumlah 96 responden dan menggunakan metode sampel jenuh. Tehnik analisa yang diterapkan yaitu analisa regresi linier berganda. Temuan dalam studi ini menggambarkan bahwa implementasi *good corporate governance*, penerapan budaya tri hita karena, dan *whistleblowing system* pada perusahaan menggambarkan pengaruh positif signifikan terhadap upaya pencegahan fraud di Bank BPD Bali.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*; Budaya Tri Hita Karana; *Whistleblowing System*; Pencegahan *Fraud*.

Fraud Prevention Factors in Banking Institutions

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the factors that influence the prevention of fraud in banking institutions including the implementation of good corporate governance, the application of the tri hita karena culture and the existence of a whistleblowing system. The location of this research is the Regional Development Bank (BPD) Bali with a population of all staff of BPD Bali Renon branch with a total sample of 96 respondents and using the saturated sample method. The analysis technique applied is multiple linear regression analysis. The findings in this study illustrate that the implementation of good corporate governance, the application of the tri hita karena culture, and the whistleblowing system in the company illustrates a significant positive effect on fraud prevention efforts at Bank BPD Bali.

Keywords: *Good Corporate Governance*; *Tri Hita Karana Culture*; *Whistleblowing System*; *Fraud Prevention*.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 6
Denpasar, Juni 2021
Hal. 1592-1603

DOI:
10.24843/EJA.2021.v31.i06.p19

PENGUTIPAN:
Dewi, P.P., Suwantari, N.P.E.
& Pradhana, I.P.D. (2021).
Faktor-Faktor Pencegahan
Fraud pada Lembaga
Perbankan. *E-Jurnal*
Akuntansi, 31(6), 1592-1603

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
6 Mei 2021
Artikel Diterima:
24 Juni 2021

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan merupakan suatu badan usaha yang melaksanakan kegiatan penghimpunan pendanaan dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk pinjaman ataupun lainnya kepada masyarakat umum dalam upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat tersebut. Sebagai upaya pemerintah didalam meningkatkan pembangunan, pada tanggal 25 Mei 1960 telah didirikannya Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1962. Lembaga perbankan ini didirikan dengan maksud untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah secara merata di seluruh pelosok tanah air.

Isu tentang korupsi di Indonesia menjadi salah satu permasalahan yang utama bagi bangsa ini disebabkan oleh semakin meningkat terjadinya praktek-praktek tindak korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengemukakan, dari 14 lembaga paling korup diantaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Pemerintah Kota (Pemkot), Pemerintahan Provinsi (Pemprov), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KPU/KPUD, BUMD, DPRD/DPR, Badan, Perguruan Tinggi, Pengadilan, Kejaksaan, LSM, dan Bank Indonesia (www.gatra.com).

Kasus kecurangan (*fraud*) yang melanda industri perbankan di Indonesia hampir pernah terjadi disetiap daerah, khususnya pada BPD Bali, seperti kecurangan yang terjadi pada BPD Kupang di awal dengan kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh 4 orang karyawan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,1 Miliar, selanjutnya pada BPD Jawa Barat juga terjadi kasus dugaan kredit fiktif, lalu menyusul kasus fraud BPD Papua yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 17 Miliar. Di Bali kasus fraud pada BPD juga terjadi di tahun 2017 dengan dugaan kasus korupsi sebesar Rp 200 Miliar namun hingga akhir tahun 2018 kasus tersebut tidak menemukan titik terang hingga pada akhirnya di tutup begitu saja dan tidak terungkap hingga saat ini karena tidak adanya bukti yang cukup dalam menyelesaikan kasus ini (Antara News, 2010).

Berbagai bentuk *fraud* jika dilakukan secara bersamaan ataupun dalam kondisi terorganisasi seringkali membawa dampak negatif tidak saja bagi orang-orang yang berada dalam institusi tetapi juga pihak eksternal entitas, dalam hal ini masyarakat. Tindakan *fraud* akan dapat tertangani hanya jika ada orang atau pihak tertentu yang berani membuka dan menentang tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi *stakeholder* terutama masyarakat. Pencegahan *fraud* dapat dilakukan apabila *whistleblowing system* diterapkan oleh perusahaan dengan baik. *Whistleblowing* adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok dengan maksud guna melaporkan atau mengungkapkan kecurangan baik yang terjadi di perusahaan ataupun atasan mereka kepada pihak yang berwenang (Sorensen.D.P, n.d.). Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya permasalahan terkait fenomena tersebut, sehingga perlu diterapkan model tata kelola yang mampu mendorong perusahaan kearah yang lebih tepat (Dwijia Putri *et al.*, 2017).

Indonesian Forum for Corporate Governance (FCGI) mengungkapkan mengenai konsep *good corporate governance* sebagai sebuah aturan yang menjelaskan mengenai hubungan yang terjadi antara pemerintah, karyawan, kreditur, serta para *stakeholder* lainnya baik internal dan eksternal. Konsep *good corporate governance* dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem tata kelola organisasi dimana

mampu mengendalikan perusahaan serta mengarahkan dalam upaya meningkatkan kualitasnya. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang tepat pada sebuah instansi maupun organisasi sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, dapat didukung oleh pelaksanaan konsep kearifan lokal yaitu *tri hita karana*.

Tri Hita Karana (THK) dikatakan sebagai sebuah tatanan yang mana menjelaskan tentang pelaksanaan aktivitas berdasarkan budaya masyarakat Bali. Filosofi THK sudah sangat dikenal oleh masyarakat Bali dimana merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali. THK merupakan filosofi yang mendasari masyarakat Bali dalam menjaga hubungan yang kepada Tuhan, terhadap sesama manusia serta dengan lingkungan alam sekitarnya. THK merupakan kearifan lokal yang menjadi tolak ukur masyarakat Bali dalam menjalankan aktivitasnya di Bali (Dewi, 2018). Adanya kesesuaian antara penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, *whistleblowing* disertai dengan penguatan konsep budaya kearifan lokal di Bali yaitu THK dalam organisasi secara komprehensif diharapkan membawa suatu dampak positif bagi pencegahan *fraud* terutama bagi entitas yang memiliki akses kuat bagi masyarakat selaku *stakeholder*.

Fraud triangle theory adalah sebuah pernyataan yang mengungkapkan mengenai dorongan yang mampu menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan yakni mengenai segitiga kecurangan yang menggambarkan adanya 3 kondisi penyebab terjadinya penyalahgunaan aset dan kecurangan dalam laporan keuangan. Komponen segitiga kecurangan yang dikembangkan oleh Donald R Cressey adalah tekanan (*Pressure*), pembenaran (*Rationalize*) dan kesempatan (*Opportunity*). Kecurangan terjadi apabila 3 (tiga) faktor tersebut muncul atau ada secara bersama-sama. *Good corporate governance* adalah sebuah tata cara mengelola suatu perusahaan dengan memperhatikan keberlanjutannya dimasa yang akan datang yang telah diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF). Konsep THK dikatakan sebagai sebuah kajian unsur budaya yang saat ini telah berkembang sebagai kebiasaan masyarakat Bali dan dewasa ini telah menjadi falsafah maupun landasan dalam berbisnis. Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2018) merangkum makna *whistleblowing system* sebagai sebuah aktivitas pelaporan atas tindakan pelanggaran atau skema pengungkapan dari suatu tindakan melawan aturan, perbuatan yang tidak sesuai norma dan moral maupun perbuatan lain yang mampu menyebabkan kerugian suatu organisasi ataupun para pemangku kepentingan.

Tingginya intensitas kecurangan yangmana terjadi dalam suatu institusi mengharuskan untuk diterapkannya manajemen usaha yang baik dan menyeluruh (Arfah, 2011). Manajemen *good corporate governance* dirancang untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan (Paramita, 2020). Implementasi *good corporate governance* searah dengan pencegahan *fraud* (Jannah, 2016). Apabila perusahaan telah menerapkan langkah yang dijelaskan di dalam implementasi *good corporate governance* seperti keterbukaan, tidak diskriminatif, tanggungjawab yang jelas dan kontrol masyarakat, maka perusahaan akan dapat menangkal terjadinya *fraud* (Karyono, 2013). Apabila kita kaitkan kondisi tersebut terhadap pemahaman mengenai *Fraud Triangle Theory* dimana perusahaan akan berusaha mengecilkan atau menghilangkan kesempatan para pegawainya untuk melakukan kecurangan melalui serangkaian SOP (*Standard Operating*

Procedure) yang dapat disusun oleh manajemen seperti penerapan kebijakan "Cashless" artinya tidak ada lagi pembayaran dengan uang tunai atau semua transaksi melalui *online system*, perbankan atau sistem transfer. Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya studi yang dikembangkan oleh Susila & Prena, (2019) yang mana mengungkapkan adanya pengaruh positif signifikan antara implementasi *good corporate governance* pada pencegahan *fraud*. Hasil penelitian (Kurniawan, 2019) juga mengungkapkan dimana penerapan tata kelola dalam perusahaan secara baik berdampak positif pada upaya pencegahan kecurangan. Dari pengungkapan beberapa studi tersebut, dapat dirumuskan hipotesa sebagai berikut

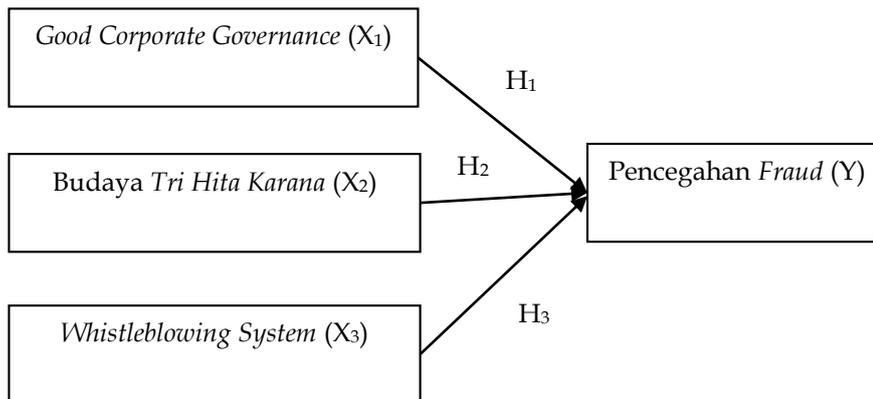
H₁: Implementasi *good corporate governance* berdampak positif signifikan pada pencegahan *fraud*.

Budaya dipandang sebagai perilaku yang dipelajari di mana menyebar pada seluruh populasi dan terjadi secara tidak sadar. (Hofstede, 1991) mengakui pentingnya budaya terhadap manajemen dan praktek kerja organisasi dan dengan menggunakan pendekatan mendefinisikan budaya dengan merujuk kepada kerangka kerja umum makna, pemahaman sosial, nilai, kepercayaan dan symbol. Konsep THK adalah sebuah harmonisasi hubungan yang dijaga dan melekat didalam kehidupan umat Hindu Bali yang bersumber dari Bhagawad Gita yang meliputi tiga hubungan manusia yakni dengan Tuhannya (*parahyangan*), antar-manusia (*pawongan*) dan juga dengan lingkungannya (*palemahan*) (Gede, 2011). Konsep tersebut dianggap sebagai sebuah falsafah yang dapat berperan bagi kehidupan bermasyarakat khususnya dalam kegiatan pengembangan organisasi yang terdiri atas kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan, dimana tri hita karena berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Saputra *et al.* 2019). Surya, (2014) menemukan bahwa budaya THK dapat meningkatkan kinerja perusahaan. BPD Bali merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan pelayanan dalam sektor perbankan kepada masyarakat Bali yang menyerap budaya lokal serta nilai-nilai luhur yang terkandung didalam budaya THK yang secara tidak langsung akan diterapkan oleh karyawan yang bekerja di lingkungan kerja tersebut. Dengan demikian dapat disusun hipotesis sebagai berikut.

H₂: Penerapan Budaya tri hita karena berdampak positif signifikan pada pencegahan *fraud*.

Sistem *whistleblowing* merupakan forum bagi *whistleblower* dalam melaporkan penipuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal organisasi Wahyuni, (2019). Dengan adanya penerapan sistem pelaporan pelanggaran secara efektif, para pelaku kecurangan akan memikirkan kembali apakah akan terus melakukan kecurangan atau menghentikan perilaku tersebut (Pamungkas *et al.*, 2017). Sehingga penerapan *whistleblowing* sistem, diharapkan dapat meminimalkan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Penelitian (Latifah, 2011) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki efek signifikan pada pencegahan penipuan fraud Prena, (2020) mengidentifikasi bahwa *whistleblowing* berdampak positif signifikan pada pencegahan kecurangan. (Islamiyah 2020) mengungkapkan bahwa *whistleblowing* menunjukkan dampak secara signifikan pada pengendalian kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat dirumuskan hipotesa ketiga yakni sebagai berikut.

H₃: *Whistleblowing system* berdampak positif terhadap pencegahan *fraud*.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2019

METODE PENELITIAN

Studi ini dilaksanakan pada salah satu lembaga sektor perbankan yang terdapat Bali yakni BPD Bali cabang Renon dengan melakukan pengujian kepada karyawan instansi tersebut dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Adapun pemilihan BPD Bali adalah bank ini merupakan salah satu bank umum yang terdaftar dalam sistem perbankan nasional serta memiliki peran dalam peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Jumlah populasi dalam studi ini sebanyak 96 orang yang merupakan staf dari BPD Bali cabang Renon yakni bagian kredit, pelaksana, teller, *customer service*, arsip, operator, BOF, DJA, HAK dan PNK.

Metode sampel jenuh diaplikasikan pada studi ini yakni dengan melibatkan seluruh populasi yang ada sebagai responden penelitian (Sugiyono, 2018). Sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 96 responden yang merupakan karyawan yang terlibat dalam penerapan GCG, THK dan *whistleblowing system*. Studi ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data yang digambarkan dalam wujud numerik atau angka dimana kemudian dianalisis melalui metode statistik (Sugiyono, 2018).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berdasarkan jawaban dari responden atas pertanyaan serta pernyataan secara tertulis terkait indikator dari masing-masing variabel yakni implementasi *good corporate governance*, penerapan budaya tri hita karana, dan *whistleblowing system* guna pencegahan *fraud* pada karyawan Bank BPD Bali. Kuesioner yang digunakan selanjutnya diukur dengan menerapkan skala pengukuran yang diberi nama skala *Likert* dengan pemberian skor 1-5. Analisis regresi linier berganda yang diterapkan pada studi ini yakni untuk mengetahui pengaruh *independent variable* pada *dependent variable* (Ghozali, 2018).

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengandung makna sistem tata kelola BPD Bali yang baik dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Indikator pengukuran variabel GCG dilakukan dengan menggunakan kumpulan nilai atau indek yang diperoleh berdasarkan penerapan prinsip-prinsip GCG yang terdiri atas *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. *Transparency* meliputi keterbukaan pengungkapan tentang waktu penerbitan laporan keuangan, visi dan

misi perusahaan, sasaran, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan pengurus, kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem pelaksanaan GCG, kejadian penting, kepemilikan saham dewan komisaris serta hubungan keluarga dan hubungan keuangan dewan komisaris dengan pihak lain. *Accountability* mengenai jumlah anggota komite audit paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi serta *reward and punishment system*. *Responsibility* terkait prinsip kehati-hatian dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. *Independency* adalah mengenai pelaksanaan RUPS minimal 1 (satu) kali dalam satu periode. *Fairness* terkait keberadaan dewan komisaris independen, uraian untuk memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai homepage sebagai akses informasi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2018).

Budaya lokal merupakan wujud dari nilai budaya masyarakat Bali dengan mengadopsi unsur-unsur dari konsep *Tri Hita Karana*. Indikator budaya THK dalam penelitian ini mencakup dimensi yang pertama yakni hubungan manusia dengan Tuhan adalah ragam bentuk aktivitas yang menyangkut tentang keterlibatan perusahaan didalam upaya meningkatkan toleransi antar umat beragama dengan segala kegiatannya, yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia yakni bagaimana perusahaan menjaga hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya untuk terlibat dalam aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungannya yang merupakan upaya perusahaan dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan untuk keberlanjutan usaha.

Menurut (Hoffman, 2009), *whistleblowing* merupakan pengungkapan oleh pegawai mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran. Indikator terkait *whistleblowing system* diantaranya yaitu kondisi yang membuat karyawan yang menyaksikan atau mengetahui adanya pelanggaran maupun untuk melaporkannya, sikap perusahaan terhadap pembalasan yang mungkin dialami oleh pelapor pelanggaran, kemungkinan tersedianya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan, bila manajemen tidak mendapatkan respon yang sesuai.

Pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan apabila *whistleblowing system* diterapkan oleh karyawan. Dimensi pencegahan fraud terdiri atas budaya jujur dan etika yang tinggi, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud, dan pengawasan oleh komite audit. Indikator budaya jujur dan etika yang tinggi berupa menetapkan *tone at the top*, menciptakan lingkungan kerja yang positif, mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat, pelatihan, dan konfirmasi. Indikator tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan fraud meliputi identifikasi risiko kecurangan, mengukur risiko kecurangan, mengurangi risiko kecurangan dan memantau program pengendalian. Pengawasan oleh komite audit terkait pada pelaporan, laporan periodik dan laporan lain (Tunggal, 2018).

Studi ini menerapkan teknik analisa regresi linier berganda melalui beberapa tahapan pengukuran asumsi klasik yakni uji normalitas, heteroskedastisitas dan juga multikolinearitas serta kelayakan model melalui

penerapan sebuah sistem yang disebut dengan SPSS (*Statistical Package For Social Science*) versi 22. Model persamaan regresi yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan pengujian variabel yang terdapat pada studi ini dapat disusun sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- Y = Pencegahan *fraud*
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X₁ = *Good corporate governance*
- X₂ = Budaya tri hita karena
- X₃ = *Whistleblowing system*
- ε = Koefisien error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dari 80 orang responden yaitu 83,33 persen dari total 96 responden yang seharusnya. Responden pada penelitian sebagian besar berusia 25 - 35 tahun yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 63,8 persen dan responden paling sedikit berusia 36 - 50 tahun sebanyak 2 responden atau 3,5 persen yang didominasi perempuan dimana perempuan sebanyak 49 orang atau sebesar 61,3 persen, sedangkan laki - laki sebanyak 31 orang atau sebesar 38,8 persen.

Responden yang diuji yakni bagian kredit, pelaksana, teller, customer service, arsip, Operator, BOF, DJA, HAK dan PNK dimana terbanyak pada jabatan pelaksana diperoleh responden sebanyak 62 orang atau sebesar 77,5 persen dan responden paling sedikit pada jabatan DJA. HAK, Operator, PNK dan Tenaga Arsip diperoleh responden pada masing-masing jabatan tersebut sebanyak 1 orang atau sebesar 1,3 persen.

Hasil pengujian normalitas menunjukkan gambaran besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sejumlah 0,610 yakni lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang mana mengilustrasikan bahwa data dalam studi ini berdistribusi normal, dari hal tersebut dirumuskan bahwa konsep pengujian variabel ini memenuhi syarat asumsi normalitas.

Pada pengujian multikolonieritas menunjukkan adanya keseluruhan variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10, begitu juga dengan perhitungan nilai VIF yang menggambarkan angka lebih kecil dari 10. Kondisi ini mengandung arti bahwa pada desain regresi yang disusun tidak mengandung gejala multikolonieritas. Dalam pengukuran heteroskedastisitas menunjukkan hasil yakni setiap desain mengandung kecenderungan signifikansi melebihi nilai 0,05. Hal ini mengidentifikasi dalam desain regresi ini tidak menunjukkan adanya keseragaman varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan berikutnya atau dikatakan tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil perhitungan *adjusted R Square* yang ditunjukkan oleh Tabel 1, yakni besarnya *Adjusted (R²)* sejumlah 0,522, yang mengandung makna 52,2 persen variasi variabel pencegahan *fraud* dapat dijelaskan oleh kombinasi dari ketiga variabel *Good corporate governance* , budaya tri hita karena dan

whistleblowing, namun sisanya dengan jumlah 47,8 persen akan dipengaruhi oleh unsur lain diluar desain penelitian yang belum sempat dijelaskan dalam studi ini. Koefisien determinasi (R^2) diterapkan untuk mendeteksi batas kemampuan sebuah desain dalam bervariasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah terletak diantara nol dan satu. Apabila nilai R^2 menunjukkan angka kecil mengartikan bahwa kemampuan antar variabel bebas dalam memaknai variasi pada variabel terikat tersebut sangat minim. Nilai yang mendekati satu pada variabel - variabel independen menunjukkan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Secara general, nilai koefisien determinasi bagi data silang (*crosssection*) cenderung lebih kecil yang disebabkan karena terdapatnya variasi yang lebih luas antara tiap unsur pengamatan, namun demikian untuk data yang menggunakan kurun waktu (*time series*) umumnya memiliki nilai koefisien determinasi yang cenderung lebih besar (Sugiyono, 2018).

Tabel 1. Uji Koefisien Determinasi

Model	R^2	Adjusted R^2	Std. Error of the Estimate
1	0,735 ^a	0,540	0,522

Sumber: Data Penelitian, 2019

Uji F dapat digunakan sebagai media pengujian secara simultan dari tiap variabel. Dalam pengujian variabel pada studi ini ditetapkan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05 (Sugiyono, 2018). Pada Tabel 2, menggambarkan hasil uji F yang menunjukkan nilai sebesar 29,718 dengan nilai sig sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas secara simultan/bersama-sama terhadap variabel terikat.

Tabel 2. Uji F Anova

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1000,154	3	333,385	29,718	0,000 ^b
	Residual	852,596	76	11,218		
	Total	1852,750	79			

Sumber: Data Penelitian, 2019

Hasil pengujian hipotesa dalam studi ini digambarkan pada uji regresi berganda Tabel 3. Berdasarkan hasil pengujian melalui analisa regresi linier berganda dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 4,605 + 0,511X_1 + 0,298X_2 + 0,402X_3 + \varepsilon$$

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	4,605	2,547		1,808	0,075
	X ₁	0,511	0,111	0,393	4,584	0,000
	X ₂	0,298	0,093	0,306	3,212	0,002
	X ₃	0,402	0,166	0,236	2,426	0,018

Sumber: Data Penelitian, 2019

Nilai koefisien konstanta yang digambarkan pada hasil uji tersebut yakni sejumlah 4,605 yang memiliki makna bahwa apabila seluruh variabel bebas mengandung nilai nol (0) maka pencegahan *fraud* akan menunjukkan angka sejumlah nilai konstanta yakni 4,605. Nilai koefisien regresi untuk variabel *good*

corporate governance yakni sejumlah 0,511 yang mengandung makna bila variabel ini meningkat sebesar satu satuan maka pencegahan *fraud* akan meningkat juga sejumlah 0,511. Nilai pengujian tersebut mengandung makna untuk setiap peningkatan pada *good corporate governance* dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Nilai koefisien dari persamaan regresi budaya tri hita karena adalah sejumlah 0,298 yang mengartikan bila variabel ini meningkat sebesar satu satuan mengakibatkan pencegahan *fraud* akan juga mengalami peningkatan sejumlah 0,298. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya pemahaman budaya tri hita karena maka akan dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Nilai koefisien dalam persamaan regresi untuk pengujian variabel *whistleblowing* yakni sejumlah 0,402 yang mengartikan bila variabel *whistleblowing system* meningkat sebesar satu satuan akan mampu meningkatkan pencegahan *fraud* sejumlah 0,402. Hal ini memberikan arti bahwa peningkatan penerapan *whistleblowing system* maka dapat meningkatkan pencegahan *fraud*.

Pengujian signifikansi *good corporate governance* (X1) pada pencegahan *fraud* dilaksanakan dengan menerapkan uji t, melalui upaya membandingkan signifikansi t dengan α (0,05). Besaran nilai koefisien t adalah 4,584 sedangkan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$ (0,05), mengandung arti terjadi penolakan terhadap H_0 dan H_1 dapat diterima, dengan demikian mengindikasikan adanya pengaruh positif signifikan dari variabel *good corporate governance* pada pencegahan *fraud*. Hal ini dapat dimaknai bahwa jika semakin bagus implementasi *good corporate governance* dalam sebuah Lembaga maka akan mampu meningkatkan upaya pencegahan *fraud* pada Lembaga tersebut dalam hal ini BPD Bali, begitu juga sebaliknya jika semakin kacanya penerapan *good corporate governance* maka secara otomatis akan dapat menurunkan tindakan pencegahan *fraud* pada Lembaga tersebut. Dengan adanya maksimalisasi pelaksanaan konsep *good corporate governance* akan mampu meminimalisir peluang terjadinya kecurangan karena secara otomatis akan mampu mendorong kepada pemanfaatan sumber daya yang ada untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi perusahaan, yang tujuannya guna membantu terciptanya perkembangan dan peningkatan ekonomi secara keseluruhan, meningkatkan kinerja manajerial dan juga *corporate board* dalam upaya pemantauan penggunaan aset perusahaan guna menghindari terjadinya praktek korupsi. Hal tersebut didukung temuan dari studi yang dilakukan oleh (Prena, Gine Das, (2020) dan (Kurniawan, Pratomo Cahyo, 2019) menyatakan adanya pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap pencegahan *fraud*.

Pengujian hipotesa kedua, menunjukkan hasil nilai koefisien t 3,212 dan nilai signifikansi $0,002 < \alpha$ (0,05), yang dapat diartikan adanya penolakan terhadap H_0 sedangkan H_2 dapat diterima, dengan demikian penerapan budaya tri hita karena pada bank BPD Bali mengindikasikan adanya pengaruh positif signifikan pada pencegahan *fraud*. Kondisi ini mengandung makna bahwa jika semakin bagus pelaksanaan konsep budaya tri hita karena akan mampu memaksimalkan tindakan pencegahan *fraud* di Bank Pembangunan Daerah Bali, begitu juga sebaliknya semakin buruk penerapan budaya tri hita karena maka akan menurunkan pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Apabila karyawan diarahkan untuk mengaplikasikan konsep budaya tri hita karena di dalam perusahaan maka hal tersebut mampu mendorong mereka untuk selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan organisasi tersebut, dalam

membangun hubungan baik dengan perusahaan karyawan akan bekerja serta meningkatkan integritas dan kejujurannya.

(Wiana, 2004) menekankan tentang hakikat dari konsep ajaran tri hita karena yakni mengenai tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan itu meliputi hubungan antar sesama manusia, hubungan dengan alam sekelilingnya, dan juga hubungan terhadap Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Tiap hubungan tersebut mengandung falsafah pedoman hidup dalam menghargai sesama aspek sekeliling kita. Temuan dari penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Saputra, Adi Kurniawan, 2018) yang mengungkapkan bahwa budaya tri hita karena memiliki efek positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil pengujian H_3 , pengujian signifikansi *whistleblowing* (X3) terhadap pencegahan *fraud* dilaksanakan melalui penerapan uji t, yakni membandingkan signifikansi t dengan α (0,05). Besaran koefisien t 2,426 dan poin signifikansi 0,018 < α (0,05), yang mengandung makna penolakan H_0 dengan demikian H_3 dapat diterima, dimana mengartikan bahwa *whistleblowing* memberikan pengaruh positif signifikan dalam upaya pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat *whistleblowing system* dapat memaksimalkan tindakan pencegahan kecurangan pada Bank BPD Bali, begitu juga sebaliknya apabila semakin rendah *whistleblowing system* maka akan menurunkan upaya pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Apabila suatu instansi menerapkan *whistleblowing* sistem dengan baik dimana karyawan akan mempunyai keberanian dalam mengungkapkan terjadinya kecurangan, hal tersebut akan dapat mencegah terjadinya tindakan manipulasi khususnya menyangkut sisi finansial. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2018) mengartikan *whistleblowing* sebagai sebuah upaya pengungkapan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan dari perbuatan yang melawan aturan atau hukum yang berlaku, perbuatan tidak sesuai etika, norma dan moral serta aktivitas lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan, yang dilaksanakan oleh staf atau unsur organisasi lainnya kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain atas tindakan pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini biasanya dilaksanakan secara tertutup atau rahasia (*confidential*). Hasil pengujian ini selaras dengan studi yang dilaksanakan oleh Prena (2020) dan Islamiyah (2020) dimana mengungkapkan bahwa *whistleblowing* memberikan dampak positif signifikan dalam upaya tindakan pencegahan *fraud*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan yakni penerapan *good corporate governance* menunjukkan dampak positif signifikan dalam upaya pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Kondisi ini mengartikan bahwa jika semakin bagus penerapan *good corporate governance* maka akan meningkatkan pula tindakan pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Variabel budaya tri hita karena mengidentifikasi adanya efek positif signifikan pada upaya pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan budaya tri hita karena maka akan meningkatkan pencegahan *fraud* pada Lembaga tersebut.

Whistleblowing mampu memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Pembangunan Daerah Bali. Hasil tersebut mengandung arti jika semakin meningkatnya *whistleblowing* sehingga dapat memaksimalkan pula pencegahan *fraud* pada BPD Bali

Saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Bank Pembangunan Daerah Bali hendaknya melaksanakan prinsip tata Kelola yang baik sehingga mampu membimbing karyawan dalam menerapkan konsep tersebut dengan mengimplementasikan budaya tri hita karena dalam setiap aktivitas yang dikerjakan agar nantinya mampu mencegah terjadinya kecurangan. Bank Pembangunan Daerah Bali juga dapat memberikan motivasi kepada karyawan agar memiliki keberanian dalam mengungkap kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam lagi kemungkinan adanya unsur-unsur lain yang akan dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan yang mungkin saja terjadi selain *good corporate governance*, budaya tri hita karena dan *whistleblowing*. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas objek penelitiannya, tidak hanya pada satu Lembaga perbankan saja namun dapat dikembangkan pada bank umum lainnya.

REFERENSI

- Antara News. (2010). *Potret Profesi Audit Internal (Di Perusahaan Swasta dan BUMN terkemuka)*. Alfabeta. <https://bali.antaranews.com>
- Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Kota Bandung). *Jurnal Investasi*, 7(2), 137-.
- Dwija Putri, I. G. A. M. A., Ulupui, I. G. K. ., & Wirawati, N. G. P. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i01.p03>
- Gede, R. I. (2011.). Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan Dan Orientasi Pasar Serta Konsekuensinya Pada Kinerja Usaha (Studi Pada IKM Kerajinan Perak Di Bali). *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hoffman, W. M. & R. E. (2009). A Business Ethics Theory of Whistleblowing. *Journal of Business and Environmental Ethics*, 12 (8), 45-59.
- Hofstede. (1991). *Culture and organizations, Software of Min, Mc Graw - Hill*. <http://www.bi.go.id/is.statistik>
- Islamiyah, F, Made, A, S. A. . (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Desa di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1).
- Jannah, S. F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya). *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 7(2): 200.

- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2018). *Pedoman Sistem Pelaporan - SPP (Whistleblowing System-WBS)*.
- Kurniawan, Pratomo Cahyo, and K. N. I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud. *ECONBANK. Journal of Economics and Banking* 1(1): 55–60.
- Latifah, I. (2011). Pengaruh Efektivitas Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud (Survei pada Karyawan Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat). *Prosiding Akuntansi*, 484–495.
- Omika Dewi.I.G.A.A, I. G. A. A. P. D. (2018). Culture of Tri Hita Karana on Ease of Use Perception And Use of Accounting Information System. *International Journal of Social Sciences And Humanities, Vol.2, No.2, (77-86)*.
- Pamungkas, I.D, Ghozali. Imam, Achmad, T. (2017). The Effect of The Whistleblowing System on Financial Statement Fraud: Ethical Behavior As The Mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology, 8 (10), 1592-1598*.
- Paramita, N.L.P, et. a. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Good Corporate Governance dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.11, No.2*.
- Prena, Gine Das, and R. M. K. (2020). Faktor-Faktor Pendukung Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(1): 84.
- Saputra, Adi Kurniawan, et. a. (2018). Pespektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Saputra.A. Kurniawan Saputra; Edy Sujana; Gede Mandirta Tama. (2019). Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*.
- Sorensen, D.P, M. S. . (n.d.). Financial Accounting Scandals And The Reform of Corporate Governance In The United States And In Italy. *Emerald Publishing Limited, Vol.17. No.1. 77-88*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Surya, I. B. K. (2014). *Pengaruh Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Mediasi Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi*.
- Susila, M. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi, 6(1), 80*.
- Tunggal, A. W. (2018). *Audit Manajemen Kontemporer* (Edisi Revi). Harvarindo.
- Wahyuni, E.S, N. (2019). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 6(1), 189-194*.
- Wiana, I. K. (2004). *Menuju Bali Jagadhita: Tri Hita Karana Sehari-hari dalam Bali: Menuju Jagadhita Aneka Persepektif*.